

## **BAB V PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

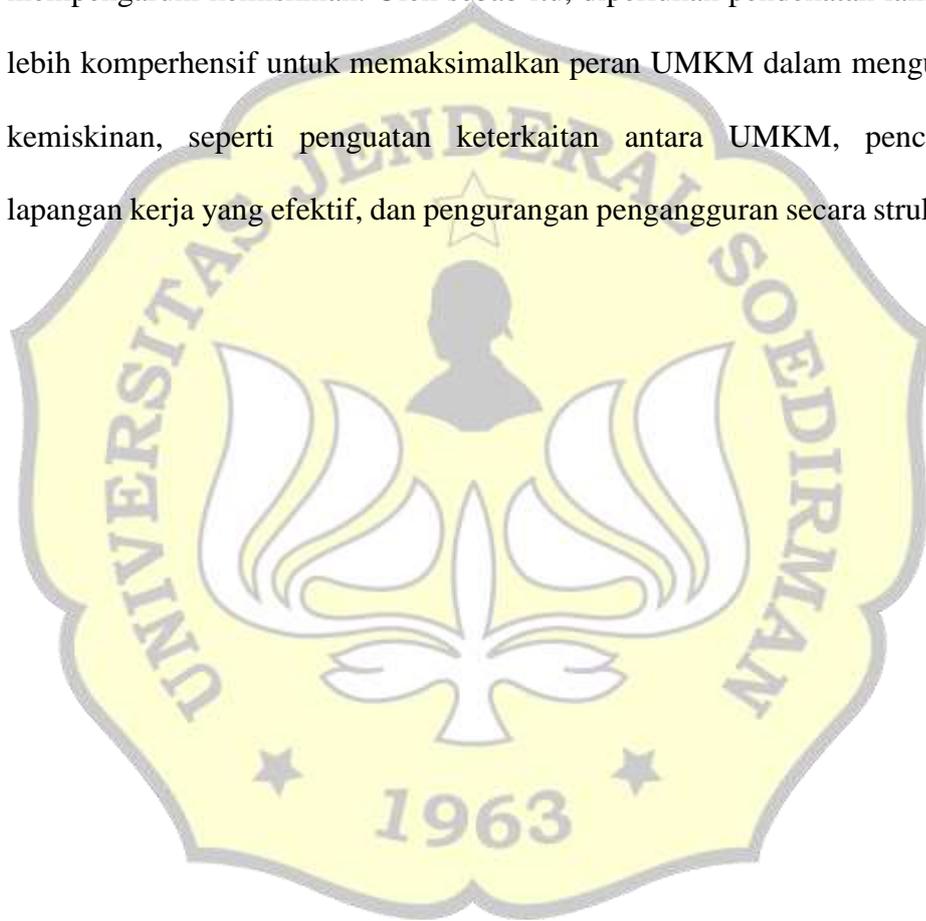
Berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis data yang dilakukan terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah UMKM, PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan TPT terhadap P0 di Tujuh Daerah Provinsi Jawa Tengah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap P0 di wilayah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau perubahan pada PAD belum mampu secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah – daerah tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya pendekatan lain yang lebih efektif sebagai upaya pengentasan kemiskinan seperti optimalisasi program pengentasan kemiskinan seperti penggunaan PAD untuk alokasi belanja pemerintah daerah untuk kegiatan yang lebih produktif sehingga dapat mendorong produktivitas masyarakat miskin dalam jangka panjang untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.
- b. Variabel PDRB sektor perdagangan besar dan eceran berpengaruh negatif terhadap P0 di daerah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas dan kontribusi

sektor perdagangan besar dan eceran dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan di tujuh wilayah tersebut. Dengan demikian penguatan saktor perdagangan besar dan eceran menjadi salah satu strategi yang efektif dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Variabel jumlah UMKM tidak berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin di daerah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Sukoharjo. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM saja belum cukup untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah seperti penguatan kualitas UMKM, peningkatan produktivitas, akses pasar, dan kapasitas UMKM agar sektor ini dapat berkontribusi lebih efektif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.
- d. Variabel TPT tidak berpengaruh terhadap PO di daerah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara pengangguran dengan kemiskinan di tujuh wilayah ini tidak langsung atau dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komperhensif seperti peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, dan penguatan sektor ekonomi sehingga masyarakat dapat bekerja dengan terjamin di dalam sektor formal untuk mengatasi masalah kemiskinan secara efektif.

- e. Variabel TPT tidak mampu menjadi variabel mediasi antara jumlah UMKM dengan persentase penduduk miskin di daerah Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Sukoharjo. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan UMKM belum secara langsung atau tidak langsung melalui pengangguran mempengaruhi kemiskinan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan lain yang lebih komperhensif untuk memaksimalkan peran UMKM dalam mengurangi kemiskinan, seperti penguatan keterkaitan antara UMKM, penciptaan lapangan kerja yang efektif, dan pengurangan pengangguran secara struktural.



## 2. Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis data yang dilakukan mengenai pengaruh PAD, Jumlah UMKM, PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan TPT terhadap P0 di Tujuh Daerah Jawa Tengah, penelitian ini memberika beberapa implikasi diantaranya:

PDRB sektor perdagangan besar dan eceran di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap P0. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran berpotensi mengurangi penduduk miskin melalui penciptaan peluang kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian implikasi praktis yang dapat diberikan adalah perlu adanya dorongan pengembangan sektor perdagangan besar dan eceran. Pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pengembangan infrastruktur perdagangan, pemberdayaan pelaku UMKM, dan peningkatan akses pasar sehingga dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, melalui kebijakan yang mendukung pelaku usaha lokal seperti kemudahan perizinan, insentif pajak, serta penyediaan infrastruktur dan fasilitas perdagangan yang memadai untuk meningkatkan daya saing usaha. Sehingga penting untuk memastikan manfaat sektor perdagangan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak hanya berdampak pada pengurangan kemiskinan tetapi juga dapat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah di Jawa Tengah dan menciptakan siklus positif yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif

### 3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, selama proses penelitiannya dengan demikian peneliti berikutnya dapat mempertimbangan kekurangan penelitian ini karena adanya keterbatasan berikut:

- a. Belum tersedianya situs resmi yang menyajikan data rinci mengenai jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di setiap kabupaten/kota. Hasilnya, pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada berbagai sumber alternatif yang dinilai memiliki tingkat akurasi yang relatif rendah. Hal ini dapat mempengaruhi keabsahan data dan hasil analisis yang diperoleh, sehingga perlu diinterpretasikan secara hati-hati.
- b. Tidak tersedianya data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk tahun 2016, yang terjadi karena tidak adanya pelaksanaan sensus pada tahun tersebut. Alternatifnya, data TPT diperoleh melalui estimasi estimasi oleh peneliti dengan menghitung rata-rata jumlah TPT selama 10 tahun terakhir di setiap daerah. Pendekatan ini berpotensi menghasilkan data dengan tingkat presisi yang lebih rendah dibandingkan data sensus resmi, sehingga dapat mempengaruhi akurasi hasil analisis.